

Pendampingan Sistem Dan Panduan RAPBS Sekolah Muhammadiyah

Arum Indrasari¹, Wahyu Manuhara Putra²

12. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

Email wahyu_m@umy.ac.id

DOI: 10.18196/ppm.35.113

Abstrak

Mitra Pengabdian Masyarakat pada hibah pengabdian masyarakat ini adalah Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk membantu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta dapat menyusun pedoman dan Sistem Informasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) pada Amal Usaha Muhammadiyah SD dan SMP sehingga memenuhi kaidah akuntabilitas dan responsibilitas serta transparansi. Metode kegiatan ini dilaksanakan dalam tahap: sosialisasi pentingnya mengelola keuangan AUM; pelatihan bagi pengelolaan keuangan; pendampingan penyusunan Sistem Informasi RAPBS; pembuatan manual pengelolaan anggaran serta menyusun sistem informasi RAPBS. Tahap pertama dilaksanakan bagi pengurus LPPK sehingga pemahaman konsep anggaran diseminasi kepada pengelola keuangan sekolah. Pelatihan Sistem Informasi Keuangan RAPBS bekerja sama dengan PDM, LPPK bagi pengelola keuangan sekolah. Tahap berikutnya pendampingan penyusunan Sistem Informasi RAPBS bagi SD SMP Muhammadiyah. Dilanjutkan dengan penyusunan manual SOP pengelolaan anggaran sekolah berdasarkan sistem akuntansi. Terakhir, menyusun sistem informasi yang terintegrasi dan auditable. Sistem informasi RAPBS mengimplementasikan Sistem Informasi RAPBS yang memenuhi prinsip *easy to use* dan *usefulness*, sesuai manfaat informasi dan kebutuhan pengelola keuangan. Hasil akhir pengabdian ini berupa peningkatan kualitas sistem informasi RAPBS SD SMP Muhammadiyah Kota Yogyakarta dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan diharapkan sistem *real time processing* bisa dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Kata Kunci: RAPBS, pengelola keuangan, PDM, AUM

Pendahuluan

Persyarikatan Muhammadiyah sudah melakukan perbaikan tata kelola keuangan sekolah dengan adanya Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai menempatkan dana Amal Usaha Muhammadiyah di bank syariah mitra Muhammadiyah serta keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menjelaskan pengaturan iuran anggota, infak tetap, infak siswa, dan mahasiswa, serta alokasi dana persyarikatan sebagai pembiayaan aktivitas secara mandiri (PP Muh, 2015). Berikutnya adalah Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Dana Terpadu Layanan Manajemen Kas. Dalam SK itu, PP Muhammadiyah mengupayakan fasilitas pembiayaan mudharabah muqayyadah deposit kepada bank syariah mitra Muhammadiyah sampai mendekati 100 persen dari jumlah deposito yang diagunkan. Penggunaan deposito sebagai agunan dilakukan dengan mengagunkan deposito milik jenjang, unsur, atau amal usaha Muhammadiyah yang bersangkutan atau deposito milik jenjang, unsur, atau amal usaha Muhammadiyah yang lainnya (Pakkanna, 2017). Maka, pengelolaan keuangan bagi Amal Usaha Muhammadiyah harus sesuai dengan Syariat Islam, terpadu, dan dalam kerangka mewujudkan keuangan yang berorientasi pada transparansi dan responsibilitas.

Hal ini juga sebenarnya diperkuat pada Mukhtamar Muhammadiyah Yogyakarta bahwa pengelolaan kekayaan dalam Muhammadiyah agar diselenggarakan dengan sistem yang baku,

utuh, transparan dan *auditabel* (P. W. Muhammadiyah, 2015). Ditambah lagi adanya arahan Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Mukktamar Muhammadiyah ke-43 bahwa Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan Muhammadiyah mengusahakan sistem laporan keuangan yang standar untuk Persyarikatan Muhammadiyah.

Mengingat hal itu, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Yogyakarta mensyaratkan bahwa sekolah harus menerapkan pengelolaan keuangan yang baku, terintegrasi sesuai dengan kaidah *organizational public governance* dan standar akuntansi organisasi nirlaba. Namun, dalam kenyataan, semenjak Mukktamar 1990 sampai sekarang tidak banyak dan masih dijumpai berbagai Amal Usaha Muhammadiyah, khususnya sekolah yang pengelolaan kekayaan keuangannya belum terpadu, transparan, dan *auditabel*. Hal ini dimungkinkan sistem tata kelola organisasi publik belum secara optimal mampu dijalankan oleh sekolah Muhammadiyah.

Tata kelola keuangan bagi Amal Usaha Muhammadiyah perlu dilakukan perbaikan dengan perhatian dan kajian semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun, berdasarkan observasi awal sistem tata kelola anggaran AUM sekolah selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Usaha ikhlas umat dan lembaga Muhammadiyah dalam mengatasi permasalahan di atas belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang terintegrasi bagi pengelolaan keuangan Amal Usaha Muhammadiyah. Belum optimalnya sistem keuangan yang diterapkan sekolah kemungkinan disebabkan oleh masih minimnya sistem fasilitas dan sumber daya manusia dalam menjalankan sistem tersebut.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, PWM, PDM melalui Majelis Dikdasmen dan LPPK (Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan) maupun Lazizmu sebenarnya sudah berusaha mengembangkan dan mengimplementasikan sistem keuangan yang sesuai standar untuk digunakan dalam berbagai organisasi dan Amal Usaha Muhammadiyah. Namun, berdasarkan observasi di AUM, terutama SD dan SMP, masih ada kelemahan yaitu belum banyak dilakukan pendampingan secara terstruktur dalam mengaplikasikan sistem keuangan yang baru tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan, pendampingan, atau *mentoring* bagi Amal Usaha Muhammadiyah terutama SD SMP dalam menerapkan sistem dan prinsip akuntansi keuangan sekolah. Maka, hal urgensi utama yang dilakukan pada organisasi nirlaba seperti sekolah adalah berfokus pada implementasi sistem pertanggungjawaban anggaran.

Untuk mengatasi berbagai kendala seperti di atas, solusinya adalah perbaikan sistem pengelolaan anggaran keuangan—karena dari sistem anggaran yang baik akan menjadi pemicu dorongan mekanisme proses keuangan yang transparan dan akuntabel. Adapun bentuk perbaikannya meliputi: (1) sosialisasi pemahaman anggaran yang terintegrasi; (2) pendampingan penyusunan anggaran mendukung pengelolaan anggaran keuangan sekolah; (3) pembuatan *Standar Operating Procedure* anggaran yang terintegrasi; (4) pembuatan juknis dan juklak bagi LPPK untuk pendampingan dan pemantauan penyusunan anggaran sekolah; serta (5) pelatihan penerapan sistem pengendalian internal.

Metode Pelaksanaan

Permasalahan AUM SD SMP di Kota Yogyakarta berdasarkan observasi akan lebih mudah dilaksanakan apabila melibatkan secara penuh partisipasi berbagai pihak pemangku kepentingan. Metode pelaksanaan pelatihan dan pendampingan penyusunan Sistem Informasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Muhammadiyah di Kota Yogyakarta kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta dilaksanakan berdasarkan pendekatan sebagai berikut.

- a. Sosialisasi pentingnya mengelola keuangan AUM, khususnya terkait dengan manfaat secara ekonomi dan keberlangsungan sekolah Muhammadiyah.
- b. Pelatihan SDM untuk pengelolaan administrasi keuangan sekolah
- c. Pendampingan penyusunan Sistem Informasi RAPBS SD SMP Muhammadiyah Kota Yogyakarta.

- d. Pembuatan Buku Manual SOP pengelolaan anggaran sekolah berdasarkan sistem akuntansi yang baku.
- e. Menyusun sistem informasi yang terintegrasi dan *auditable*.

Hasil dan Pembahasan

Kerangka penyelesaian masalah yang dijalankan untuk mengatasi beberapa persoalan dalam pengembangan SOP tata kelola keuangan dengan berfokus pada sistem dan prosedur akuntansi sesuai standar akuntansi. Hal ini sesuai temuan Witurachmi (2016) bahwa isu sensitif anggaran kemungkinan adanya kesengajaan atau ketidakpahaman aturan, ketidaktertiban dalam penggunaan dana, sehingga perlu diantisipasi melalui implementasi manajemen keuangan secara tertib dan benar. Demikian juga Indra Bastian (2006), mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah harus dikelola dan dipertanggungjawabkan secara efektif efisien serta transparan. Atas dasar itu, solusinya adalah (1) melakukan sosialisasi mengenai amanah persyarikatan terhadap pentingnya konsep tata kelola keuangan; (2) membantu pelatihan pemahaman terhadap Sistem Informasi RAPBS bagi pengelola sekolah SD SMP Muhammadiyah; (3) melakukan pendampingan kepada sekolah-sekolah dalam penyusunan RAPBS; (4) menyediakan panduan teknis dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah yang berisi dasar pemikiran dan langkah-langkah pengelolalan keuangan sekolah; (5) serta menyusun sistem informasi yang terintegrasi dan *auditable*.

Pada tahap sosialisasi, disampaikan pentingnya mengelola keuangan AUM khususnya terkait dengan manfaat secara ekonomi dan keberlangsungan sekolah Muhammadiyah. Kegiatan ini dilaksanakan khusus bagi pengurus LPPK PDM Kota Yogyakarta, hal ini dilakukan karena semua tanggung jawab teknis dan *monitoring* pelaksanaan pengelolaan keuangan sekolah SD SMP Muhammadiyah dibawah koordinasi LPPK. Kegiatan ini untuk menumbuhkan pemahaman para pengurus LPPK untuk dapat memahami konsep dan pentingnya anggaran sebagai perwujudan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan utama sekolah. Sehingga dari hasil sosialisasi pemahaman konsep dan prinsip anggaran akan disebarluaskan dari pengurus LPPK kepada semua pengelola keuangan sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini diselenggarakan pada rapat rutin pengurus LPPK di kantor PDM Kota Yogyakarta.

Pada tahap pelatihan SDM untuk pengelolaan administrasi keuangan sekolah, bekerja sama dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan, Tim Pengabdian Masyarakat UMY melakukan pelatihan Sistem Informasi Keuangan RAPBS kepada semua pengelola keuangan sekolah SD dan SMP Muhammadiyah di Kota Yogyakarta.

Pada tahap pendampingan penyusunan Sistem Informasi RAPBS SD SMP Muhammadiyah Kota Yogyakarta dilakukan pendampingan secara intensif dan *monitoring* terhadap pelaksanaan penyusunan sistem informasi RAPBS SD SMP Pelaksanaan yang dilakukan di kantor PDM Kota Yogyakarta di bawah koordinasi Pimpinan Harian PDM, LPPK, Majelis Dikdasmen PDM Kota Yogyakarta. Kegiatan ini bersamaan dengan pelaksanaan *monitoring* dan verifikasi RAPBS TA 2020/2021 SD SMP Muhammadiyah Kota Yogyakarta.

Pada tahap pembuatan, Buku Manual SOP pengelolaan Anggaran sekolah didasarkan pada sistem akuntansi yang baku. Selama tahap ini, berlangsung pertemuan-pertemuan dengan LPPK dan sekolah-sekolah di lingkungan PDM Kota Yogyakarta sehingga terdapat masukan dari LPPK PDM dan sekolah untuk dibuat Konsep dan Standar Akuntansi Penganggaran Sekolah yang meliputi SOP Penyusunan RAPBS, Standar Akuntansi, serta Pedoman Anggaran Sekolah. Hasilnya standar utama sudah dibuat.

Tahap terakhir berupa menyusun sistem informasi yang terintegrasi dan *auditable*. Berdasarkan pengalaman PDM terhadap pelaksanaan pengelolaan anggaran sekolah, perlu dilakukan perbaikan sistem informasi RAPBS. Maka, langkah yang dilakukan adalah dengan implementasi

Sistem Informasi RAPBS yang harus memenuhi prinsip *easy to use* dan *usefulness*, disesuaikan dengan manfaat informasi dan kebutuhan pengelola keuangan sekolah. Tentunya, juga telah disesuaikan dengan lingkup dan model Sekolah Muhammadiyah sehingga dampaknya bisa diselenggarakan *monitoring* secara konsisten terhadap semua pelaksanaan anggaran sekolah di Muhammadiyah. Hasilnya sudah dilakukan perbaikan ke arah kebutuhan sesuai karakteristik Sekolah Muhammadiyah di Kota Yogyakarta, tetapi masih belum memenuhi aspek kemudahan dalam melakukan *tracing* atau akses semua informasi sehingga ke depan masih harus dilakukan perbaikan berdasarkan sistem yang berbasis *real time processing*.



Gambar 1: Proses Pendampingan Penyusunan RAPBS



Gambar 2: Hasil Pengabdian Masyarakat Penyusunan Sistem Informasi RAPBS

Simpulan

Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah SD SMP Muhammadiyah Kota Yogyakarta dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kerja sama yang intensif antarpemangku kepentingan yaitu Persyarikatan PDM Kota Yogyakarta, LPPK, dan Majelis Dikdasmen PDM Kota Yogyakarta turut mendorong kemajuan penyelenggaraan keuangan sekolah. Keterlibatan penuh kepala sekolah, bendahara, kasir, dan guru-guru sekolah yang selalu membuka diri untuk kemajuan sekolah membuat penyelenggaraan keuangan sekolah menunjukkan ke arah yang lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan semangat dari sekolah tersebut untuk mengimplementasikan sistem informasi RAPBS keuangan yang sudah terkomputerisasi yang baru. Diharapkan untuk satu tahun ke depan evaluasi terhadap sistem tersebut berupa realisasi keuangan *real time processing* yang bisa

dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Ucapan Terima Kasih

Kami menyampaikan terima kasih yang sedemikian besar kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai pihak yang memberikan bantuan hibah pengabdian, juga disampaikan terima kasih Kepada Pimpinan Harian PDM Kota Yogyakarta, Kepada Pengurus LPPK Kota Yogyakarta, Kepada Majelis Dikdasmen serta Pimpinan SD SMP Muhammadiyah Kota Yogyakarta yang bersedia bekerja sama dengan tim Pengabdian Masyarakat UMY. Kami mengakui bahwa kegiatan ini jauh dari kesempurnaan selama pelaksanaan pengabdian masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ali, M. 2016. "Membedah Tujuan Pendidikan Muhammadiyah". *Profetika*, Jurnal Studi Islam, 17(1), 43–56.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Pendidikan, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Erlangga.
- Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, T. D. W. 2014. *Intermediate Accounting (16th ed.)*. Wiley.
- Ferdi, W. 2013. "Pembiayaan Pendidikan; Suatu Kajian Teoretis". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19(4), 565–578.
- Muhammadiyah, P. 1998. *Pedoman Pengurusan Keuangan, Majelis/Bagian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Penyelenggaraan Perguruan Muhammadiyah*. Jakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis P & K.
- Muhammadiyah, P. W. 2015. *Berita Resmi Muhammadiyah: Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-27: Keputusan Tentang Fikih Tata Kelola*. Yogyakarta.
- Witurachmi, Sri. 2016. "Isu-Isu Strategis dalam Meningkatkan Efisiensi, Akuntabilitas, Transparansi, dan Meminimalkan Penyalahgunaan Anggaran Sekolah". *Makalah*. Seminar Nasional Pendidikan (SNP) 2016, ISSN: 2503-4855. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.